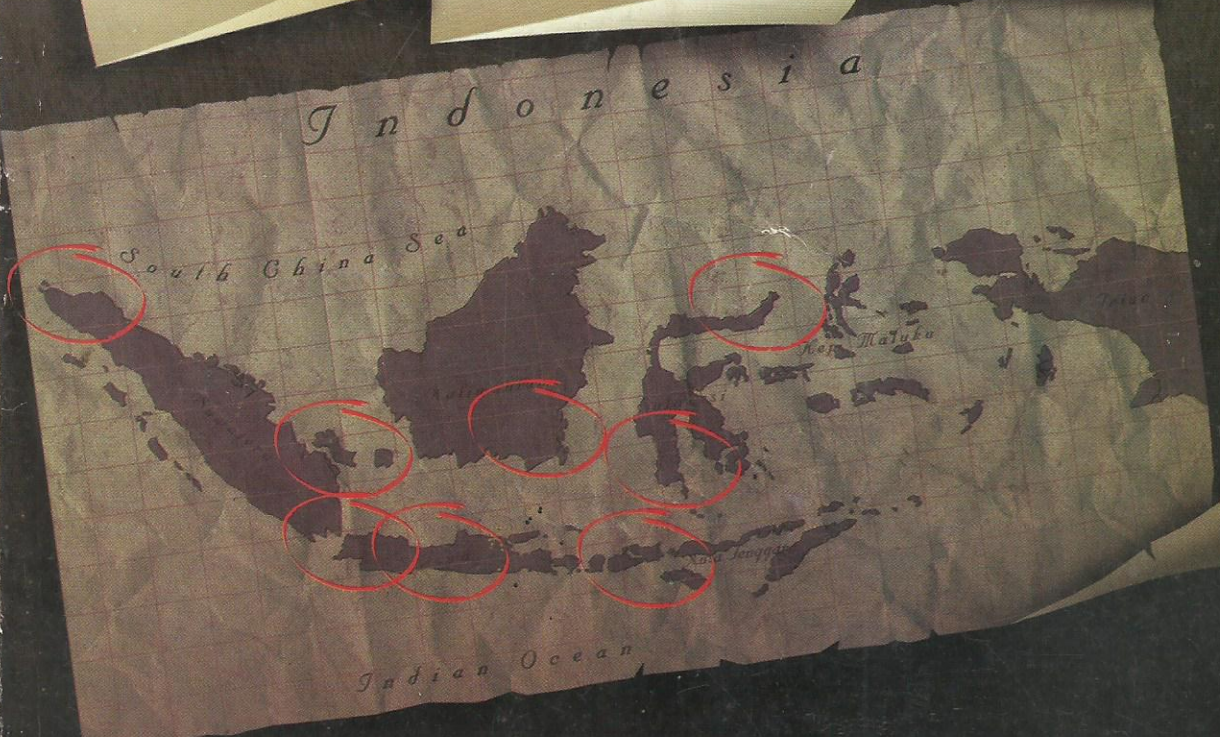
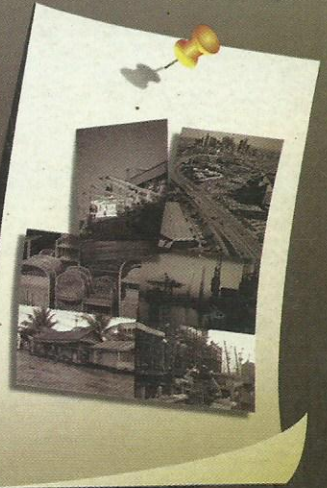


PENGEMBANGAN WILAYAH

Perdesaan dan Kawasan Tertentu :
Sebuah Kajian Eksploratif

Penyunting :
Suhandojo
Sri Handoyo Mukti
Tukiyat



Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Penerbit

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu:

Sebuah Kajian Eksploratif /

penyunting, Suhandoyo, Sri Handoyo Mukti, Tukiya. -- Jakarta :

Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan

Wilayah (KTPW) - BPPT, 2000

363 + viii hlm. ; 24 cm.

ISBN 979-95745-3-6

1. Perencanaan daerah -- Aspek pemerintahan.

2. Pengembangan desa -- Penelitian

I. Suhandoyo.

II. Mukti, Sri Handoyo.

III. Tukiya.

352.7

**Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu:
Sebuah Kajian Eksploratif**

©Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

All rights reserved

Penyunting : Suhandoyo, Sri Handoyo Mukti, Tukiya

Desain sampul oleh Gajah Oleng Art & Graphic Design

Desain dan pewajahan oleh Suhandoyo

Diterbitkan pertama kali oleh

Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah

BPPT

Jakarta, Agustus 2000

Edisi Pertama, 2000

Dicetak oleh PT. Bangkit Nusa Persada, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit*

KATA PENGANTAR

Buku ini menyajikan konsep-konsep dan hasil penelitian yang bersifat eksploratif mengenai tiga pilar pengembangan wilayah (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi), baik di wilayah perdesaan maupun kawasan tertentu. Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah (KTPW), BPPT pada tahun anggaran 1999/2000.

Bagian Satu diawali dengan konsep Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Otonomi Daerah yang dibahas secara runtut oleh Prof. Dr. Mubyarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM). Berikutnya disajikan hasil penelitian wilayah perdesaan, baik kondisi secara nasional maupun kasus-kasus, di antaranya adalah kasus wilayah perdesaan Propinsi NTB, Kabupaten Takalar, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Terakhir tulisan dari Dr. Candra Fajri Ananda, M.Sc, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tentang konsep pembangunan perdesaan yang terintegrasi.

Bagian Dua membahas konsep-konsep dan hasil penelitian mengenai pengembangan kawasan tertentu. Diawali oleh konsep pengembangan kawasan tertentu oleh Prof. Dr. Herman Haeruman, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, dan Ir. Sugeng Triutomo, DESS., sekretariat DP-KTI. Selanjutnya disajikan hasil penelitian kawasan tertentu, yaitu: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET): Manado-Bitung, Batulicin, dan Sabang, Kawasan Andalan Tolitoli; Kawasan Kepulauan dan Pesisir: Pulau Bangka, dan pesisir Jawa-Bali, Kawasan Kritis Lingkungan Situ Rawa Besar Depok, dan Kawasan Cepat Tumbuh Jabotabek.

Atas nama Direktorat KTPW, saya sangat menaruh perhatian dan penghargaan yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan, sehingga buku ini bisa diwujudkan. Kritik dan saran perbaikan akan sangat dihargai dan diharapkan.

Jakarta, 10 Oktober 2000

Direktur Kebijakan Teknologi
untuk Pengembangan Wilayah, BPPT



Ir. Aunur Rofiq Hadi, MSc

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN <i>Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</i>	iii
KATA PENGANTAR <i>Direktur Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah</i>	v
PENJELASAN ISTILAH Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional	vi
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN I	1
PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN	
1. Pengembangan Wilayah Pembangunan Perdesaan dan Otonomi Daerah <i>Prof. Dr. Mubyarto</i>	3
2. Konsep Dasar Penataan Ruang Wilayah Perdesaan <i>Ir. Dodi Slamet Riyadi, MT</i>	17
3. Industrialisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan <i>Socia Prihawantoro, SE. ME. dan Dr. Muchdie</i>	35
4. Penguasaan Teknologi Petani Tambak Di Pulau Sumbawa <i>Ir. Maryadi, MA.</i>	51
5. Kemampuan Petani Tambak Udang di Wilayah Perdesaan NTB <i>Drs. Fathoni Moehtadi, MPA.</i>	71
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa Nelayan Di Kabupaten Takalar <i>Mien Askinatin, Ssi dan Binuko Dani S, Ssi, Warseno, SH.</i>	87
7. Sikap Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan <i>Drs. Urbanus M. Ambardi</i>	101
8. Strategi Pemasaran Ikan Laut Di Desa Nelayan Kabupaten Takalar <i>Ir. Abdul Malik, MSc. MM. Dan Drs. Supratikno, MSi</i>	115
9. Mobilitas Penduduk Dan Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Jawa Tengah <i>Drs. Tukiyat, MSi dan Ir. Suhandoyo, MSi</i>	129

10. Industri Pengolahan Gula Kelapa Untuk Pengembangan Wilayah Perdesaan 147
Drs. Maridi
11. Kambing PE Sebagai Produk Unggulan Wilayah Perdesaan 165
Drs. Noko Sudarisman, MM.
12. Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi: Tantangan dan Prospek 179
Dr. Candra Fajri Ananda, M.Sc.

BAGIAN II
PENGEMBANGAN KAWASAN TERTENTU

13. Pengembangan Kawasan Tertentu Dalam Penataan Ruang Nasional 193
Prof. Dr. Herman Haeruman dan Ir. Sugeng Triutomo, DESS
14. Kompetensi Inti Sektor Unggulan KAPET Manado-Bitung 205
Dr. Muchdie
15. Produktivitas Pekerja dan Pengembangan KAPET Batulicin 227
Ir. Suhandoyo, MSi, Drs. Subroto Ary, MSi dan Drs. Bhinukti PN.
16. Analisis Perekonomian KAPET Batulicin 245
Drs. Djarwadi, MT. dan Dra. Endang Trihadiwati
17. Pengembangan Wilayah Berbasis Teknologi: Kasus Kota Sabang 259
Alkadri, SE. MSi
18. Tim Koordinasi Sebagai Alternatif Lembaga Pengelola Kawasan Andalan: Kasus Tolitoli 275
Warseno, SH
19. Pemodelan Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Bangka: Aplikasi Dinamika Sistem 289
Ir. Sri Handoyo Mukti, MT
20. Pengembangan Kawasan Pesisir: Sebuah Kajian Eksploratif 305
Ir. Ati Widiati, MT
21. Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Situ Rawa Besar, Kota Depok 323
Drs. Hamid, MSi
22. Dinamika Interaksi Antarwilayah Di Kawasan Cepat Tumbuh Botabek 339
Drs. Sunartono

3

INDUSTRIALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Socia Prihawantoro, Muchdie

Peneliti Bidang Perekonomian Wilayah Direktorat KTPW, BPPT
socia@hotmail.com

3.1 Pendahuluan

Anutan pembangunan Indonesia selama lebih kurang tiga dasawarsa terakhir adalah meningkatkan peranan sektor industri dalam struktur perekonomian nasional, karena diyakini bahwa industrialisasi mempunyai peran yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Poot, Kuyvenhoven dan Jansen, 1991). Hasilnya adalah peningkatan sumbangan sektor industri terhadap perekonomian nasional yang cukup besar, dari sekitar 20% pada dasawarsa 60-an menjadi sekitar 40% dalam dasawarsa 90-an (Hill, 1994; Basri, 1996). Pertumbuhan ekonomi per tahun selama lima tahun pertama dalam dasawarsa 90-an mencapai angka 6% per tahun, dengan pertumbuhan sektor industri mencapai 12% per tahun (Sjahrir dan Brown, 1992). Dari aspek distribusi, permasalahan utama yang perlu dipertanyakan adalah tentang siapa sebenarnya yang menerima manfaat dari pertumbuhan sektor industri ini.

Dengan melakukan analisis terhadap data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 1993 (BPS, 1994), studi ini mencoba meneliti aliran manfaat pertumbuhan ekonomi dalam periode industrialisasi tersebut. Dalam studi ini akan dibandingkan antara manfaat pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berasal dari sektor industri, yang diterima

masyarakat perkotaan dengan yang diterima masyarakat perdesaan. Pada masyarakat perdesaan akan dibandingkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, yakni: masyarakat pertanian dan bukan pertanian. Di dalam masyarakat pertanian akan dibandingkan manfaat yang diterima rumah tangga pertanian golongan atas, menengah, bawah dan buruh tani.

Periode industrialisasi yang dimaksudkan dalam studi ini adalah periode pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I) Indonesia 1969-1994 karena menurut Mubyarto (2000) bahwa periode 1969-1994 merupakan tahap pembangunan ekonomi.

3.2 Metodologi

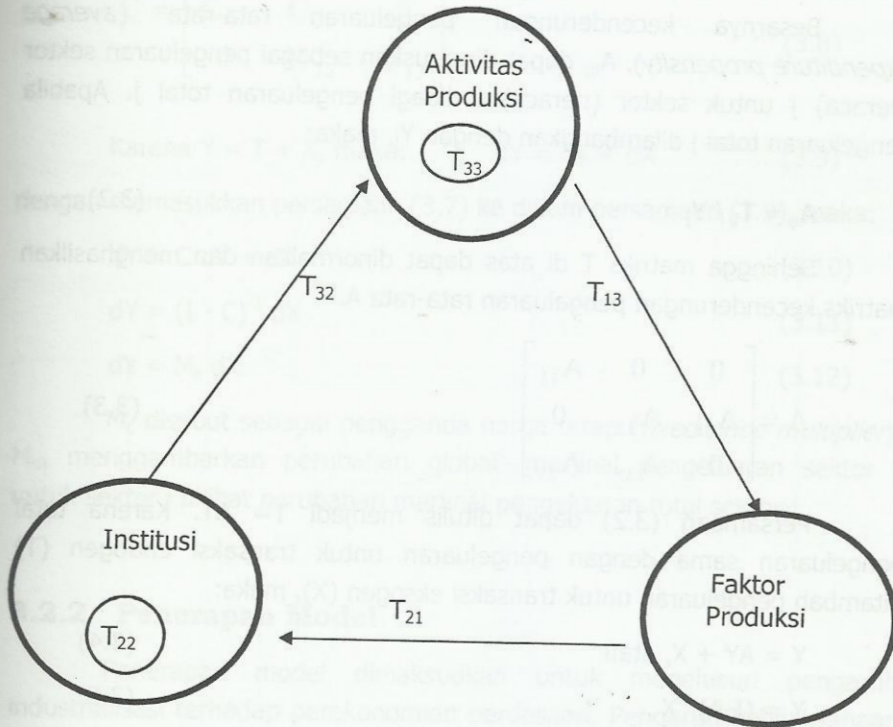
3.2.1 Model Dasar

Model dasar yang digunakan dalam studi ini adalah Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau *Social Accounting Matrix* (SAM), suatu model yang merangkum neraca sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Neraca (*account*) tersebut secara garis besar dapat dibagi dalam empat neraca, yakni:

- (1) neraca faktor produksi (misal: tenaga kerja, modal);
- (2) neraca institusi (misal: rumah tangga pertanian, rumah tangga bukan pertanian);
- (3) neraca sektor (aktivitas) produksi (misal: pertanian, industri, jasa) dan;
- (4) neraca eksogen atau neraca lainnya (*rest of the world*).

Tiga neraca pertama merupakan neraca endogen, yang dipengaruhi oleh neraca eksogen. Hubungan transaksi antara ketiga neraca endogen dapat dilukiskan dalam Gambar 3.1. Tanda panah pada gambar tersebut menunjukkan arus moneter dari satu neraca ke neraca lainnya. T_{ij} diartikan sebagai transaksi antara i dengan j dengan arus moneter dari j ke i . Dengan demikian tergambar bahwa dalam perekonomian terjadi arus moneter dari aktivitas produksi menuju faktor produksi (dalam bentuk upah, sewa, dsb), dari faktor produksi menuju institusi (karena institusi sebagai pemilik faktor produksi), dari institusi menuju aktivitas produksi

(pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli), transfer antar institusi dan pembayaran antarsektor dalam aktivitas produksi (pembayaran atas permintaan antara).



Gambar 3.1

Transaksi Antarneraca Endogen dalam SNSE

Dalam model SNSE, gambaran di atas dirangkum dalam sebuah matriks transaksi T sebagaimana terdapat dalam persamaan (3.1). Sama seperti Gambar 3.1, baris ke- i menunjukkan komposisi pendapatan sektor i , sedangkan kolom ke- j menunjukkan distribusi pengeluaran sektor j . Dalam hal ini baris ke-1 menunjukkan komposisi pendapatan faktor produksi, baris ke-2 institusi dan baris ke-3 aktivitas produksi. Demikian pula kolom ke-1 menunjukkan distribusi pengeluaran faktor produksi, kolom ke-2 institusi dan kolom ke-3 aktivitas produksi.

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & 0 \\ 0 & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Besarnya kecenderungan pengeluaran rata-rata (*average expenditure propensity*), A_{ij} , dapat dirumuskan sebagai pengeluaran sektor (neraca) j untuk sektor (neraca) i dibagi pengeluaran total j . Apabila pengeluaran total j dilambangkan dengan Y_j , maka:

$$A_{ij} = T_{ij} / Y_j \quad (3.2)$$

Sehingga matriks T di atas dapat dinormalkan dan menghasilkan matriks kecenderungan pengeluaran rata-rata A .

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

Persamaan (3.2) dapat ditulis menjadi $T = AY$. Karena total pengeluaran sama dengan pengeluaran untuk transaksi endogen (T) ditambah pengeluaran untuk transaksi eksogen (X), maka:

$$Y = AY + X, \text{ atau} \quad (3.4)$$

$$Y = (I-A)^{-1}X \quad (3.5)$$

Kalau $M_a = (I-A)^{-1}$, maka

$$Y = M_a X \quad (3.6)$$

dimana M_a adalah pengganda neraca (*accounting multiplier*).

Sedangkan besarnya kecenderungan pengeluaran marjinal (*marginal expenditure propensity*), C_{ij} , dapat dirumuskan sebagai perubahan langsung marjinal pengeluaran sektor (neraca) j untuk sektor i akibat perubahan marjinal pengeluaran total sektor j .

$$C_{ij} = dT_{ij} / dY_j \quad (3.7)$$

Matriks kecenderungan pengeluaran marjinal, C , dibuat atas dasar asumsi harga tetap (*fixed prices*). Format matriks C sama dengan matriks A

di atas, hanya saja pengertian rata-rata diubah menjadi pengertian marginal.

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & 0 \\ 0 & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Karena $Y = T + X$, maka: $dY = dT + dX$ (3.9)

dengan memasukkan persamaan (3.7) ke dalam persamaan (3.9), maka:

$$dY = C dY + dX \quad (3.10)$$

$$dY = (I - C)^{-1} dX \quad (3.11)$$

$$dY = M_c dX \quad (3.12)$$

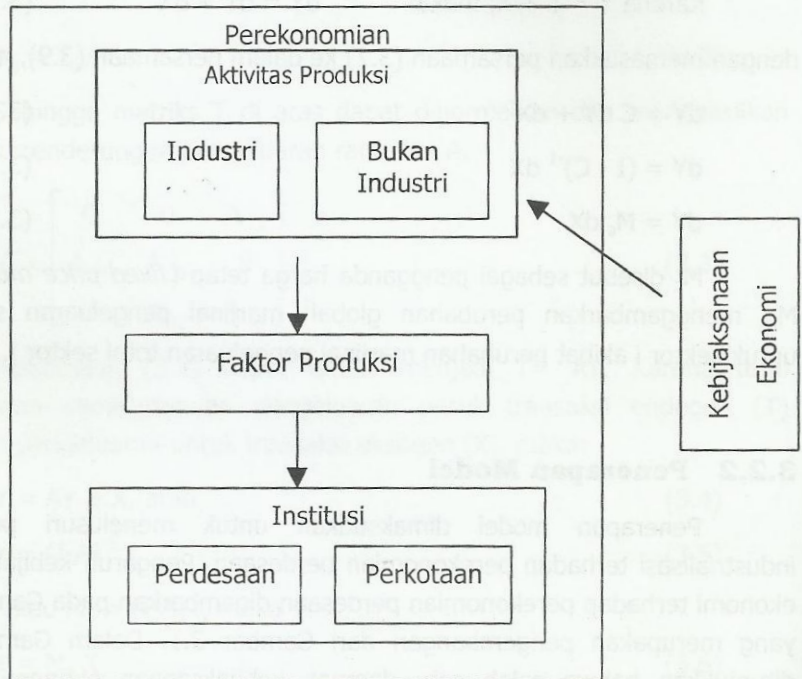
M_c disebut sebagai pengganda harga tetap (*fixed price multiplier*). M_{cij} menggambarkan perubahan global¹ marginal pengeluaran sektor j untuk sektor i akibat perubahan marginal pengeluaran total sektor j .

3.2.2 Penerapan Model

Penerapan model dimaksudkan untuk menelusuri pengaruh industrialisasi terhadap perekonomian perdesaan. Pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap perekonomian perdesaan digambarkan pada Gambar 3.2 yang merupakan pengembangan dari Gambar 3.1. Dalam Gambar 3.2 ditunjukkan bahwa salah satu dampak kebijaksanaan ekonomi adalah terpengaruhnya neraca aktivitas produksi. Aktivitas produksi dalam pembahasan ini dibagi 2, yaitu: aktivitas (sektor) industri dan aktivitas (sektor) bukan industri. Yang dimaksud aktivitas bukan industri adalah aktivitas yang biasanya dikelompokkan dalam sektor pertanian dan sektor jasa. Kebijaksanaan ekonomi yang berpengaruh pada kenaikan produksi total sektor industri inilah yang disebut industrialisasi.

¹ Perubahan global merupakan penjumlahan antara perubahan langsung dengan perubahan tidak langsung.

Pada tahap selanjutnya industrialisasi akan mempengaruhi penggunaan faktor produksi, dan lebih lanjut penggunaan faktor produksi ini akan mempengaruhi penerimaan institusi (rumah tangga) yang dalam kajian ini dibagi menjadi dua, yakni: rumah tangga perdesaan dan rumah tangga perkotaan. Kenaikan penerimaan rumah tangga perdesaan inilah yang dianggap mencerminkan kenaikan kesejahteraan masyarakat perdesaan.



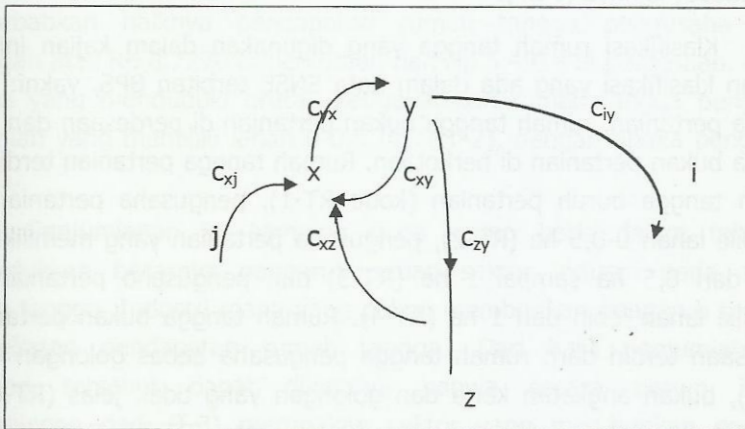
Gambar 3.2

Pengaruh Kebijakan Ekonomi terhadap Perekonomian Perdesaan

Indikator-indikator perubahan marginal sebagaimana diuraikan dalam metodologi dasar SNSE di atas akan digunakan dalam melakukan analisis pengaruh industrialisasi terhadap perubahan kemakmuran di perdesaan. Dari matriks pengganda harga tetap M_c , akan dianalisis satu submatriks, katakan M_{cij} , dengan j sektor industri dan i rumah tangga perdesaan. Dengan demikian akan diketahui pengaruh global perubahan

marjinal pengeluaran total sektor industri terhadap perubahan marjinal pengeluaran total rumah tangga perdesaan.

Untuk mengetahui jalur-jalur kritis yang dilalui suatu sektor industri dalam mempengaruhi suatu rumah tangga perdesaan, dipergunakan analisis penelusuran jalur struktural atau *structural path analysis* (SPA). Dengan analisis ini dapat diketahui jalur pengaruh industrialisasi terhadap kesejahteraan suatu rumah tangga perdesaan. Sebagai ilustrasi perhatikan Gambar 3.3. Secara struktural pengaruh sektor j terhadap sektor i, misalkan, melalui sektor-sektor x, y dan z sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3, maka dalam analisis penelusuran jalur struktural akan dicari jalur yang memiliki angka pengganda langsung terbesar yang menghubungkan sektor j dengan sektor i tersebut.



Gambar 3.3
Penelusuran Jalur Struktural

3.2.3 Data

Data yang digunakan adalah data SNSE 1993 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) yang berukuran 106x106 sektor, yang di dalamnya hanya terdapat 5 sektor industri. Dalam studi ini sektor industri tersebut kemudian dirinci menjadi 27 sektor dengan pedoman Tabel *Input-Output* (I-O) 161 sektor.

Sektor industri dalam studi ini mencakup: industri-industri pengolahan dan pengawetan makanan (selanjutnya diberi kode I-1), minyak dan lemak (I-2), penggilingan padi (I-3), tepung segala jenis (I-4), gula (I-5), makanan lainnya (I-6), minuman (I-7), rokok (I-8), kayu gergajian dan awetan (I-9), kayu lapis dan sejenisnya (I-10), bahan bangunan dari kayu (I-11), perabot rumah tangga dari kayu, bambu dan rotan (I-12), barang lainnya dari kayu, gabus, bambu dan rotan (I-13), barang-barang anyaman kecuali dari plastik (I-14), pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit (I-15), bubur kertas (I-16), kertas dan karton (I-17), barang-barang dari kertas dan karton (I-18), barang-barang cetakan (I-19), pupuk (I-20), pestisida (I-21), kimia (I-22), semen (I-23), barang-barang dari karet, plastik dan mineral bukan logam (I-24), logam dasar (I-25), pengilangan minyak bumi (I-26), alat angkutan, barang dari logam dan industri lainnya (I-27).

Klasifikasi rumah tangga yang digunakan dalam kajian ini sama dengan klasifikasi yang ada dalam data SNSE terbitan BPS, yakni: rumah tangga pertanian, rumah tangga bukan pertanian di perdesaan dan rumah tangga bukan pertanian di perkotaan. Rumah tangga pertanian terdiri dari: rumah tangga buruh pertanian (kode RT-1), pengusaha pertanian yang memiliki lahan 0-0,5 ha (RT-2), pengusaha pertanian yang memiliki lahan lebih dari 0,5 ha sampai 1 ha (RT-3) dan pengusaha pertanian yang memiliki lahan lebih dari 1 ha (RT-4). Rumah tangga bukan pertanian di perdesaan terdiri dari: rumah tangga pengusaha bebas golongan rendah (RT-5), bukan angkatan kerja dan golongan yang tidak jelas (RT-6) dan rumah tangga pengusaha bebas golongan atas (RT-7). Rumah tangga bukan pertanian di perkotaan terdiri dari: rumah tangga pengusaha bebas golongan rendah (RT-8), bukan angkatan kerja dan golongan yang tidak jelas (RT-9) dan rumah tangga pengusaha bebas golongan atas (RT-10).

3.3 Hasil dan Pembahasan

Besarnya pengganda masing-masing sektor industri terhadap setiap rumah tangga disajikan dalam tabel 3.1. Angka-angka yang terdapat pada tabel tersebut adalah angka-angka pengganda M_c . Baris pertama kolom kedua pada tabel tersebut misalnya, menunjukkan bahwa

perubahan produksi total industri pengolahan dan pengawetan makanan (I-1) sebesar 1 rupiah, setelah melalui keseluruhan sistem ekonomi akan berakibat pada perubahan pendapatan rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan 0-0,5 ha (RT-2) sebesar 0,2529 rupiah.

Pengaruh industrialisasi secara total dapat dilihat pada jumlah masing-masing kolom. Pada tabel 3.1 terlihat bahwa jumlah kolom terbesar terdapat pada rumah tangga pengusaha bebas golongan atas di perkotaan (RT-10), yang disusul oleh rumah tangga pengusaha bebas golongan atas di perdesaan (RT-7), dengan total angka pengganda masing-masing 8,7270 dan 5,4914. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh industrialisasi terbesar terjadi pada rumah tangga pengusaha bebas golongan atas di perkotaan dan di perdesaan. Setiap terjadi kenaikan produksi total sebesar Rp 1,00 di sektor industri, secara langsung dan tidak langsung akan menyebabkan naiknya pendapatan rumah tangga pengusaha bebas golongan atas Rp 8,7270 di perkotaan dan Rp 5,4914 di perdesaan. Rumah tangga yang menduduki urutan ketiga adalah rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan 0-0,5 ha (RT-2), dengan angka pengganda 5,3341.

Penjumlahan ke samping pada setiap baris dalam tabel 3.1 menunjukkan besarnya pengaruh setiap sektor industri pada seluruh rumah tangga. Industri mana yang paling memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga? Dari hasil penjumlahan ke samping tersebut dapat diketahui bahwa secara umum industri penggilingan padi (I-3) merupakan sektor yang memberikan pengaruh terbesar pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Industri lain yang memberikan pengaruh terbesar ternyata adalah: industri minyak dan lemak (I-2), industri pestisida (I-21), dan industri pupuk (I-20). Dua industri yang disebutkan terakhir masih mempunyai kaitan yang erat dengan kegiatan ekonomi di sektor budidaya padi.

Penjumlahan ke samping pada kelompok rumah tangga pertanian menunjukkan bahwa industri yang mempunyai pengaruh terbesar adalah: industri penggilingan padi (I-3), selain industri minyak dan lemak (I-2) dan industri gula (I-5). Demikian pula yang terjadi dengan kelompok rumah tangga bukan pertanian di perdesaan. Kesamaan antara kelompok rumah tangga pertanian dengan kelompok rumah tangga bukan pertanian di

perdesaan ini memberikan indikasi kesamaan kegiatan ekonomi sehari-hari, yang selanjutnya memberikan indikasi bahwa hampir semua rumah tangga pertanian berada di perdesaan. Tentu saja apabila kita berbicara tentang rumah tangga perdesaan, maka yang termasuk di dalamnya adalah rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian.

Tabel 3.1
Pengganda Global Sektor Industri terhadap Rumah Tangga

Industri	Rumah Tangga												
	Pertanian					Bukan Pertanian							
						Perdesaan				Perkotaan			
	RT-1	RT-2	RT-3	RT-4	Jumlah	RT-5	RT-6	RT-7	Jumlah	RT-8	RT-9	RT-10	Jumlah
I-1	0,0593	0,2529	0,0670	0,0897	0,4689	0,0768	0,0181	0,2421	0,3370	0,1329	0,0336	0,3147	0,4812
I-2	0,0717	0,3061	0,0878	0,1277	0,5933	0,0854	0,0251	0,2712	0,3816	0,1331	0,0346	0,3241	0,4918
I-3	0,0969	0,4637	0,1479	0,2277	0,9362	0,0961	0,0200	0,3143	0,4304	0,1258	0,0358	0,2835	0,4450
I-4	0,0528	0,2276	0,0639	0,0921	0,4364	0,0721	0,0202	0,2326	0,3249	0,1149	0,0287	0,2895	0,4331
I-5	0,0781	0,2983	0,0894	0,1378	0,6036	0,0837	0,0201	0,2654	0,3692	0,1192	0,0307	0,2919	0,4418
I-6	0,0631	0,2645	0,0745	0,1096	0,5117	0,0816	0,0241	0,2604	0,3661	0,1280	0,0326	0,3189	0,4795
I-7	0,0490	0,1941	0,0534	0,0768	0,3733	0,0682	0,0192	0,2173	0,3047	0,1147	0,0276	0,2923	0,4347
I-8	0,0407	0,1669	0,0472	0,0671	0,3218	0,0503	0,0154	0,1581	0,2238	0,0810	0,0208	0,5012	0,6029
I-9	0,0498	0,2246	0,0579	0,0751	0,4074	0,0711	0,0162	0,2276	0,3149	0,1169	0,0356	0,3026	0,4551
I-10	0,0468	0,2087	0,0540	0,0722	0,3816	0,0700	0,0162	0,2246	0,3108	0,1187	0,0336	0,3094	0,4618
I-11	0,0395	0,1745	0,0456	0,0637	0,3234	0,0688	0,0161	0,2209	0,3057	0,1264	0,0335	0,3450	0,5049
I-12	0,0476	0,1949	0,0517	0,0728	0,3670	0,0719	0,0172	0,2291	0,3182	0,1196	0,0346	0,3243	0,4785
I-13	0,0492	0,1898	0,0511	0,0729	0,3629	0,0756	0,0161	0,2399	0,3316	0,1344	0,0335	0,3481	0,5160
I-14	0,0598	0,2256	0,0609	0,0860	0,4323	0,0751	0,0172	0,2336	0,3259	0,1140	0,0337	0,2917	0,4393
I-15	0,0262	0,1142	0,0317	0,0455	0,2176	0,0489	0,0104	0,1680	0,2272	0,0914	0,0226	0,2535	0,3676
I-16	0,0347	0,1451	0,0382	0,0536	0,2716	0,0559	0,0152	0,1686	0,2396	0,1251	0,0344	0,3625	0,5221
I-17	0,0218	0,0924	0,0238	0,0351	0,1732	0,0362	0,0094	0,1127	0,1584	0,0814	0,0226	0,2453	0,3493
I-18	0,0250	0,1070	0,0274	0,0410	0,2004	0,0427	0,0103	0,1313	0,1843	0,0962	0,0275	0,2983	0,4220
I-19	0,0259	0,1073	0,0282	0,0417	0,2030	0,0446	0,0103	0,1379	0,1928	0,1002	0,0275	0,3043	0,4319
I-20	0,0618	0,2344	0,0587	0,0783	0,4332	0,0787	0,0289	0,2189	0,3265	0,1812	0,0474	0,4363	0,6649
I-21	0,0718	0,2698	0,0659	0,0847	0,4922	0,0840	0,0348	0,2319	0,3507	0,2131	0,0553	0,4894	0,7578
I-22	0,0326	0,1347	0,0366	0,0528	0,2566	0,0545	0,0133	0,1701	0,2378	0,1064	0,0266	0,2946	0,4275
I-23	0,0489	0,1912	0,0496	0,0662	0,3558	0,0714	0,0231	0,2100	0,3044	0,1543	0,0384	0,3790	0,5717
I-24	0,0482	0,1703	0,0468	0,0695	0,3349	0,0613	0,0152	0,1859	0,2624	0,1145	0,0286	0,2979	0,4411
I-25	0,0338	0,1350	0,0341	0,0464	0,2494	0,0496	0,0163	0,1449	0,2108	0,1104	0,0276	0,2807	0,4187
I-26	0,0385	0,1471	0,0375	0,0495	0,2726	0,0524	0,0183	0,1509	0,2215	0,1204	0,0306	0,2968	0,4477
I-27	0,0226	0,0935	0,0245	0,0357	0,1763	0,0401	0,0094	0,1232	0,1727	0,0873	0,0226	0,2513	0,3612
Tot.	1,2960	5,3341	1,4551	2,0710	10,156	1,7666	0,4760	5,4914	7,7340	3,2615	0,8605	8,7270	12,849

Sumber : Hasil pengolahan data SNSE 1993, BPS

Berbeda dengan hasil yang diperoleh pada dua kelompok rumah tangga sebelumnya, penjumlahan ke samping pada kelompok rumah tangga bukan pertanian di perkotaan menunjukkan bahwa industri yang

paling berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan adalah: industri pestisida (I-21), industri pupuk (I-20) dan industri rokok (I-8).

Hasil ini semakin memperkuat dugaan terjadinya perbedaan kegiatan ekonomi antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat perdesaan terdiri dari rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian yang dalam proses industrialisasi sangat dipengaruhi oleh industri penggilingan padi. Masyarakat perkotaan terdiri dari rumah tangga bukan pertanian yang dalam proses industrialisasi sangat dipengaruhi oleh industri pestisida dan pupuk yang merupakan penunjang bagi industrialisasi yang terjadi di perdesaan.

Dengan memperhatikan setiap kolom yang ada pada tabel 3.1 dapat diketahui sektor industri yang paling berpengaruh terhadap setiap jenis rumah tangga. Pada kolom RT-7 misalnya, dapat diketahui bahwa sektor industri yang paling berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan rumah tangga pengusaha golongan atas di perdesaan adalah sektor industri penggilingan padi, dengan angka pengganda 0,3143. Ini berarti bahwa setiap kenaikan produksi sektor industri penggilingan padi sebesar Rp 1,00 secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan rumah tangga pengusaha golongan atas di perdesaan sebesar Rp 0,3143. Untuk seluruh rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian di perdesaan, sektor industri yang paling berpengaruh dirangkum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Sektor Industri Paling Berpengaruh Terhadap Rumah Tangga di Perdesaan

No.	Rumah Tangga	Sektor Industri Paling Berpengaruh	
		Sektor Industri	Pengganda
	Pertanian:		
1.	Buruh Tani	Penggilingan Padi	0,0969
2.	Pemilik Lahan 0 – 0,5 ha	Penggilingan Padi	0,4637
3.	Pemilik Lahan > 0,5 – 1 ha	Penggilingan Padi	0,1479
4.	Pemilik lahan > 1 ha	Penggilingan Padi	0,2277
	Bukan Pertanian di Perdesaan:		
5.	Pengusaha Golongan Rendah	Penggilingan Padi	0,0961
6.	Gol. Tdk. Jelas dan Bukan Angk. Kerja	Pestisida	0,0348
7.	Pengusaha Golongan Atas	Penggilingan Padi	0,3143

Sumber : Hasil pengolahan data SNSE 1993, BPS

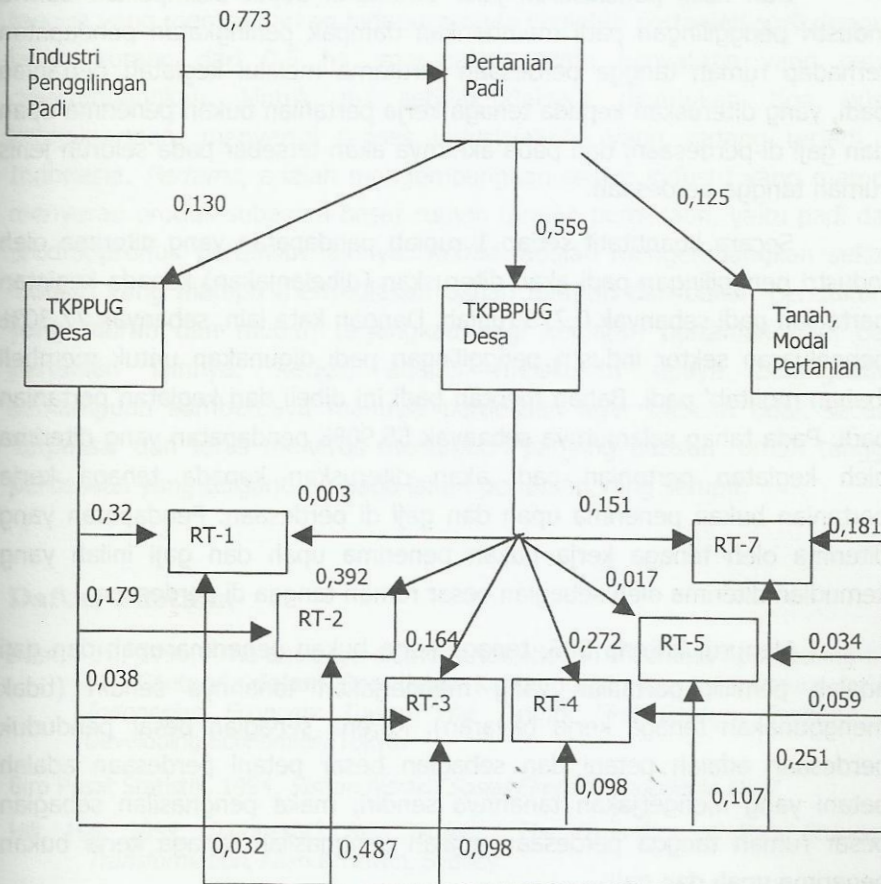
Sama dengan hasil yang diperoleh sebelumnya, industri yang paling berpengaruh terhadap setiap rumah tangga perdesaan adalah industri penggilingan padi, kecuali pada rumah tangga golongan tidak jelas dan bukan angkatan kerja (RT-6). Di antara rumah tangga perdesaan tersebut yang paling besar menerima pengaruh dari industri penggilingan padi adalah rumah tangga pertanian pemilik lahan 0-0,5 ha, dengan angka pengganda 0,4637.

3.3.1 Penelusuran Jalur Struktural

Pengaruh industri pengolahan padi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga perdesaan terjadi melalui banyak jalur. Jalur-jalur terkuat yang menghubungkan industri penggilingan padi dengan 6 rumah tangga perdesaan yang dipengaruhinya ditampilkan dalam Gambar 2.3. Pada tahap pertama peningkatan produksi pada industri penggilingan padi (I-3) akan meningkatkan peningkatan produksi pertanian padi. Pada tahap selanjutnya peningkatan produksi pertanian padi akan meningkatkan pendapatan beberapa faktor produksi. Tiga faktor produksi yang mengalami peningkatan pendapatan paling besar secara berturut-turut adalah: tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji di perdesaan (TKPBPU Perdesaan), tenaga kerja pertanian penerima upah dan gaji di perdesaan (TKPPUG Perdesaan), serta tanah dan modal pertanian (TMP). Pada tahap terakhir, peningkatan pendapatan ketiga faktor produksi tersebut mempengaruhi peningkatan pendapatan 6 rumah tangga perdesaan. Angka pengganda langsung pada setiap tahap pengaruh tercantum dalam Gambar 3.4.

Kecuali terhadap rumah tangga buruh tani (RT-1) dan rumah tangga pengusaha bebas golongan rendah (RT-5), maka jalur pengaruh yang paling menonjol terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga perdesaan adalah melalui TKPBPU Perdesaan. Pada rumah tangga pertanian pemilik lahan 0-0,5 ha (RT-2) misalnya, besarnya pengganda dari industri penggilingan padi melalui TKPBPU Perdesaan adalah $0,773 \times 0,559 \times 0,392$, sama dengan 0,1694. Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa besarnya pengganda global dari I-3 ke RT-2 adalah 0,4637. Ini berarti besarnya pengganda dari industri penggilingan padi melalui TKPBPU

Perdesaan dibandingkan pengganda globalnya adalah 0,1694 dibanding 0,4637, sama dengan 36,53%. Dapat juga dikatakan bahwa dari seluruh jaringan kegiatan ekonomi yang menjadi jalur pengaruh industri penggilingan padi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian pemilik lahan 0-0,5 ha, sebesar 36,53% ditempuh melalui jalur TKPBPUK Perdesaan. Dengan cara perhitungan yang sama akan diketahui pula bahwa jalur TKPBPUK Perdesaan merupakan 47,91% jalur I-3 ke RT-3, 51,62% jalur I-3 ke RT-4 dan 20,76% jalur I-3 ke RT-7.



Gambar 3.4

Jalur Pengaruh Industri Penggilingan Padi terhadap RT Perdesaan

3.4 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa industri penggilingan padi merupakan sektor industri yang paling memberikan dampak peningkatan (langsung dan tidak langsung) terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan. Sektor industri lain yang turut menjadi penentu kenaikan pendapatan masyarakat perdesaan adalah industri gula dan industri minyak dan lemak.

Dari hasil penelusuran jalur struktural dapat disimpulkan bahwa industri penggilingan padi memberikan dampak peningkatan pendapatan terhadap rumah tangga perdesaan terutama melalui kegiatan pertanian padi, yang diteruskan kepada tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji di perdesaan, dan pada akhirnya akan tersebar pada seluruh jenis rumah tangga perdesaan.

Secara kuantitatif setiap 1 rupiah pendapatan yang diterima oleh industri penggilingan padi akan diteruskan (dibelanjakan) kepada kegiatan pertanian padi sebanyak 0,773 rupiah. Dengan kata lain, sebanyak 77,30% pengeluaran sektor industri penggilingan padi digunakan untuk membeli 'bahan mentah' padi. Bahan mentah padi ini dibeli dari kegiatan pertanian padi. Pada tahap selanjutnya sebanyak 55,90% pendapatan yang diterima oleh kegiatan pertanian padi akan diteruskan kepada tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji di perdesaan. Pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja bukan penerima upah dan gaji inilah yang kemudian diterima oleh sebagian besar rumah tangga di perdesaan.

Menurut kriteria BPS, tenaga kerja bukan penerima upah dan gaji adalah pemilik pertanian yang mengerjakan tanahnya sendiri (tidak menggunakan tenaga kerja bayaran). Karena sebagian besar penduduk perdesaan adalah petani dan sebagian besar petani perdesaan adalah petani yang mengerjakan tanahnya sendiri, maka penghasilan sebagian besar rumah tangga perdesaan adalah penghasilan tenaga kerja bukan penerima upah dan gaji.

Pada umumnya petani yang mengerjakan tanah/sawahnya sendiri adalah petani yang memiliki lahan yang sempit, kurang dari 0,5 ha per keluarga. Oleh karena itu dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan

3.4 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa industri penggilingan padi merupakan sektor industri yang paling memberikan dampak peningkatan (langsung dan tidak langsung) terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan. Sektor industri lain yang turut menjadi penentu kenaikan pendapatan masyarakat perdesaan adalah industri gula dan industri minyak dan lemak.

Dari hasil penelusuran jalur struktural dapat disimpulkan bahwa industri penggilingan padi memberikan dampak peningkatan pendapatan terhadap rumah tangga perdesaan terutama melalui kegiatan pertanian padi, yang diteruskan kepada tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji di perdesaan, dan pada akhirnya akan tersebar pada seluruh jenis rumah tangga perdesaan.

Secara kuantitatif setiap 1 rupiah pendapatan yang diterima oleh industri penggilingan padi akan diteruskan (dibelanjakan) kepada kegiatan pertanian padi sebanyak 0,773 rupiah. Dengan kata lain, sebanyak 77,30% pengeluaran sektor industri penggilingan padi digunakan untuk membeli 'bahan mentah' padi. Bahan mentah padi ini dibeli dari kegiatan pertanian padi. Pada tahap selanjutnya sebanyak 55,90% pendapatan yang diterima oleh kegiatan pertanian padi akan diteruskan kepada tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji di perdesaan. Pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja bukan penerima upah dan gaji inilah yang kemudian diterima oleh sebagian besar rumah tangga di perdesaan.

Menurut kriteria BPS, tenaga kerja bukan penerima upah dan gaji adalah pemilik pertanian yang mengerjakan tanahnya sendiri (tidak menggunakan tenaga kerja bayaran). Karena sebagian besar penduduk perdesaan adalah petani dan sebagian besar petani perdesaan adalah petani yang mengerjakan tanahnya sendiri, maka penghasilan sebagian besar rumah tangga perdesaan adalah penghasilan tenaga kerja bukan penerima upah dan gaji.

Pada umumnya petani yang mengerjakan tanah/sawahnya sendiri adalah petani yang memiliki lahan yang sempit, kurang dari 0,5 ha per keluarga. Oleh karena itu dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan

lain, yakni bahwa sebagian besar rumah tangga perdesaan adalah rumah tangga pertanian dengan lahan yang sempit.

3.4.1 Implikasi Kebijakan

Pokok-pokok kesimpulan di atas tentunya sangatlah penting untuk dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan industri yang memberi ruangan bagi peningkatan pendapatan rumah tangga perdesaan. Bahwasanya sebagian besar rumah tangga perdesaan adalah rumah tangga yang menyandarkan hidupnya pada kegiatan pertanian padi dengan lahan kurang dari 0,5 ha, merupakan suatu kenyataan yang patut dipertimbangkan. Untuk itu setidaknya-tidaknya diperlukan tiga buah kebijakan, menyertai proses industrialisasi yang sedang terjadi di Indonesia. *Pertama*, adalah mengembangkan sektor industri yang mampu menyerap produk sebagian besar rumah tangga perdesaan, yaitu padi dan produk-produk pertanian lainnya. *Kedua*, adalah mengembangkan sektor industri yang mampu menyediakan bahan mentah dan bahan pendukung yang murah dan mudah terjangkau bagi kegiatan pertanian padi dan pertanian lainnya. *Ketiga*, adalah melakukan upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia perdesaan agar mereka tidak secara 'terpaksa' dan terus menerus menambah panjang barisan rumah tangga perdesaan yang tergantung pada lahan pertanian yang sempit.

Daftar Pustaka

- Basri, F.H., 1996, "The Chalange of Industrialization in Indonesia Approaching the 21st Century", **dalam** Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Keiji Omura (eds), *Indonesian Economy Toward the Twenty First Century*, Institute of Developing Economies, Tokyo.
- Biro Pusat Statistik, 1994, *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1993*
- Hill, Hal, 1994, *Indonesia's New Order : The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, Allen & Unwin, Sydney.
- Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Poot, H., Kuyvenhoven, A., dan Jaap Jansen, 1991, *Industrialisation and Trade in Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Pyatt, Graham dan Jeffery I. Round, 1988, "Accounting and Fixed-Price Multipliers in a Social Accounting Matrix Framework", **dalam** Graham Pyatt dan Jeffery I. Round (ed). *Social Accounting Matrices: A Basic for Planning*, The World Bank, Washington D.C., U.S.A.
- Sjahrir dan Brown, C., 1992, "Indonesian Financial and Trade Policy Deregulation: Reform and Response", **dalam** Andrew J. MacIntyre dan Kanishka Jayasuriya (eds), *The Dynamics of Economic Policy Reform in South-East Asia and the South-West Pacific*, Oxford University Press, Singapore.
- Thorbecke, Erik, 1988, "The Social Accounting Matrix and Consistency-Type Planning Models", **dalam** Graham Pyatt dan Jeffery I. Round (ed). *Social Accounting Matrices: A Basic for Planning*, The World Bank, Washington DC, USA.